

IDENTIFIKASI POTENSI DESA WISATA DI KABUPATEN CIAMIS BERBASIS COMMUNITY BASED TOURISM

Oleh :

Irfan Nursetiawan¹, Regi Refian Garis²

irfan.nursetiawan@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jln. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis.

ABSTRAK

Era otonomi daerah telah membuka peluang untuk meningkatkan tata kelola, pembangunan yang berkeadilan, dan meningkatkan layanan publik. Selain itu di bidang pembangunan ekonomi, ada perbedaan di setiap daerah. Itu disebabkan oleh perbedaan Pendapatan Asli Daerah di masing-masing daerah. Demikian juga di Kabupaten Ciamis, setelah Kabupaten Pangandaran resmi menjadi Daerah Otonomi Baru. Salah satu yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata, yaitu desa wisata yang akan menjadi objek retribusi baru dari sektor pariwisata. Desa sebagai tujuan wisata dapat diwujudkan melalui Community Based Tourism (CBT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan, yaitu observasi, tinjauan pustaka, pengumpulan data, dan analisis data. Desa yang memiliki potensi dan dapat diambil sebagai desa wisata, yaitu: (1) Desa Sukahurip; (2) Desa Karangampel; (3) Desa Karangpaningal; (4) Desa Medanglayang; (5) Desa Bangunharja; dan (6) Desa Sukamaju. Setiap desa memiliki potensi untuk menjadi desa wisata dengan beragam desa potensial yang dikelola oleh kelompok masyarakat dan masyarakat adat. Potensi yang ada di desa-desa ini dipublikasikan oleh potensi wisata alam dan budaya dan memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut. Pembuatannya, dengan potensi desa wisata berbasis CBT ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: *Potensi Desa, Desa Wisata, Community Based Tourism.*

A. PENDAHULUAN

Berangkat dari fenomena pembangunan daerah yang tidak merata, pembangunan ekonomi yang cenderung diskriminatif, dan keberlanjutan sekelompok masyarakat, maka era otonomi daerah telah membuka peluang untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, pemerataan pembangunan dan perbaikan pelayanan publik. Disamping adanya peluang, ternyata terdapat permasalahan yang muncul sebagai bentuk adanya otonomi daerah. Menurut Simanjuntak,

Bungaran. A.S (2010:108) menyatakan, dampak dari otonomi daerah diantaranya: (1) dampak sosio kultural; (2) pelayanan publik; (3) pembangunan ekonomi; serta (4) dampak bagi pertahanan, keamanan, dan integrasi nasional. Kebijakan otonomi daerah dapat memicu konflik dan memunculkan masalah horisontal dan vertikal. Sengketa antar pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah misalnya berkaitan dengan hal pengalihan aset dan batas wilayah, bahkan

dapat berimplikasi pada ketegangan antar kubu di masyarakat.

Begitupula dengan adanya pemekaran sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB), yakni adanya implikasi negatif dari pemerintah pusat terkait alokasi anggaran untuk pelayanan publik, dikarenakan adanya kebutuhan belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembangunan infrastruktur bagi DOB. Selain itu di bidang pembangunan ekonomi cenderung ada perbedaan di setiap daerah. Hal itu disebabkan oleh perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap daerahnya. Begitupula di Kabupaten Ciamis, setelah Kabupaten Pangandaran resmi menjadi DOB pendapatan retribusi dari sektor pariwisata mengalami penurunan. Di tahun 2016 realisasi pendapatan retribusi daerah dari sektor pariwisata Kabupaten Ciamis mencapai Rp.647.289.300,- sedangkan di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp.258.989.000,- (Dispar Kab. Ciamis, 2018). Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan strategi dan alternatif untuk mendongkrak PAD dari sektor pariwisata.

Salah satu yang dapat meningkatkan PAD dari sektor pariwisata, yakni dengan adanya desa wisata yang akan menjadi objek retribusi baru bidang pariwisata. Menurut Widiyanto, D., Handoyo, J. P., & Fajarwati, A. (2008) menyatakan, pengembangan pariwisata pedesaan layak dikembangkan terutama untuk mendorong kegiatan non pertanian yang pada harapannya nanti dapat mendukung diversifikasi pedesaan. Untuk mengembangkan pariwisata pedesaan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan masalah yang terdapat di daerah penelitian.

Industri pariwisata dapat pula dilakukan melalui penguatan dan

pengembangan desa wisata sebagai salah satu bagian dari kegiatan wisata. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan kepada masyarakat secara kontinyu, perlu dibuatkan Peraturan Desa (Perdes) yang akan mengatur hal-hal penting seperti status, kedudukan, hak dan kewajiban, peran serta dan tanggung jawab masyarakat adat, perlindungan kearifan lokal dan kawasan resapan air, pengawasan dan sanksi-sanksi Siswadi, S., Taruna, T., & Purnaweni, H. (2011).

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan payung hukum agar program pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata dapat terealisasi. Begitu pula di Kabupaten Ciamis yang memiliki kearifan lokal dan adanya beberapa kelompok masyarakat adat, serta hal tersebut merupakan salah satu modal sosial dapat menjadi landasan untuk menjadikan beberapa desa bertransformasi menjadi desa wisata. Namun penelitian diperlukan guna menjadi landasan akademis dalam pembukaan, penguatan dan pembukaan desa wisata tersebut.

Menurut Hadiwijoyo (dalam Fitri. Y dan Ma'rif. S, 2017) menyatakan, bahwa Desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat keseharian, memiliki arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, seperti atraksi, akomodasi, makanan-minuman dan kebutuhan wisata lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka

dengan adanya desa wisata dapat menjadi strategi alternatif dalam peningkatan PAD.

Namun untuk berbagai potensi desa di Kabupaten Ciamis cukup banyak untuk dikembangkan menjadi desa wisata belum banyak yang teridentifikasi. Maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam terhadap hal tersebut. Adapun yang menjadi urgensi penelitian ini harus dilaksanakan, yakni penelitian ini berorientasi pada strategi peningkatan PAD melalui konsep desa wisata dan selaras dengan mata kuliah azas-azas manajemen serta sistem akuntansi pemerintahan. Walaupun demikian skema dalam penelitian ini mengambil skema penelitian dosen pemula, dimana hal tersebut disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan klasifikasi jabatan fungsional peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan PAD dari sektor pariwisata di era otonomi daerah saat ini.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Desa

Keadaan pembangunan desa baik secara formal maupun informal dan kenyataan dilapangan masih banyak yang tertinggal dari segi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan publik dan bahkan daya saing desa. Namun desa pada saat ini menjadi pendorong dalam pembangunan di tingkat pemerintah daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) menyatakan, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung, desa dipersiapkan dan harus mampu menjadi desa yang mandiri. Selain itu secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara atau bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Selain itu di desa juga tidak luput dari beragam masalah.

Salah satu permasalahan yang ada di desa ditandai dengan adanya krisis perdesaan. Krisis perdesaan, yaitu krisis yang ditandai dengan penurunan kapasitas sistem sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan untuk menyediakan kebutuhan pangan, air, energi, sumber nafkah, dan perlindungan sosial bagi warganya (Shohibuddin. M, 2016). Selain permasalahan tersebut, masyarakat desa menghadapi permasalahan ekologis yang ditandai dengan penurunan daya dukung alam sebagai akibat dari praktik-praktik konsumtif eksploitatif. Oleh karenanya harus dikembalikan kembali fungsi desa sebagai penyeimbang antara pemenuhan kebutuhan masyarakat secara ekonomi dengan keadaan ekologis yang terpelihara.

Menurut Finch (dalam Dilahur, 1994) menyatakan desa adalah suatu tempat yang terutama untuk tempat tinggal

dan bahkan terutama sebagai pusat perdagangan. Desa-desa itu disusun sebagian besar oleh rumah-rumah pertanian dan dihubungkan dengan bangunan tambahan. Sehingga secara geografi desa mempunyai topografi yang bercirikan didominasi oleh lahan pertanian, seperti sawah dan ladang. Desa juga mempunyai nilai-nilai filosofis sebagai suatu kesatuan yang mempunyai nilai kearifan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ndraha (dalam Harianto, Asis. Dkk, 2011) menyatakan desa dianggap sebagai nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti kegotongroyongan, musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan, sehingga menimbulkan berbagai semboyan. Jadi, desa merupakan tempat yang terdiri dari sekumpulan masyarakat di dalam sebuah kesatuan norma hukum dan pula mempunyai kewenangan secara otonomi dalam mengatur urusan pemerintahnya, serta mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan norma sebagai ciri khas dari sebuah desa.

2. Pariwisata

Pariwisata sebagai kegiatan rekreasi bagi masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun di perdesaan. Menurut Inskeep, Edward (dalam Priyanto dan Dyah. S, 2015) Pariwisata dapat diartikan suatu aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan untuk bepergian ke suatu tempat tujuan wisata di luar keseharian dan lingkungan tempat tinggalnya untuk melakukan persinggahan yang sifatnya sementara waktu dari tempat tinggal, yang didorong beberapa keperluan tanpa untuk bermaksud mencari nafkah, namun didasarkan untuk mendapatkan kesenangan, disertai untuk menikmati berbagai hiburan yang dapat melepaskan lelah dan menghasilkan pengalaman

perjalanan berwisata dan pelayanan keramah-tamahan.

Perkembangan industri pariwisata saat ini dapat pula sebagai penopang pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai katalis atau percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Gunn, Clare. A (2002) menyatakan, pariwisata adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pergerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya, ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan tanpa bermaksud mencari nafkah. Sejalan dengan hal tersebut, pariwisata dapat dikatakan sebagai industri yang kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh baik buruknya lingkungan. Keadaan lingkungan yang baik, maka industri pariwisata akan berkembang dengan baik pula (Soemarwoto. O, 2004:309). Dengan demikian pariwisata merupakan segala macam bentuk kegiatan wisatawan yang bertujuan untuk mendapatkan ketenangan batin.

3. Konsep Desa Wisata

Sebuah kawasan perdesaan tentunya mempunyai sesuatu hal yang menarik untuk dijadikan sebagai objek wisata. Menurut Hadiwijoyo (2012) menyatakan suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen

kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman dan kebutuhan wisata lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat karakteristik sebuah desa dapat dijadikan sebagai desa wisata. Menurut syarat-syarat desa wisata, terdiri dari: (a) keunikan dan keaslian; (b) letak dan aksesibilitas; (c) budaya yang mencakup adat istiadat dan pelaku adat lokal serta norma setempat; (d) sarana dan prasarana yang mendukung; (e) alam; (f) partisipasi masyarakat lokal; serta (g) terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Nuryanti (1993) menyatakan desa wisata memiliki beberapa komponen produk wisata yang mendukung kegiatan yang ada di dalamnya, yang sering disebut sebagai 4A (Atraksi, Aktivitas, Aksesibilitas, dan Akomodasi). Adanya komponen ini menjadi faktor utama dijadikannya suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai desa wisata karena menjadi pelengkap bagi suatu desa wisata dalam menjalankan kegiatan wisata yang dimiliki.

Adapun untuk memperkaya obyek dan daya tarik wisata di sebuah desa wisata, beberapa fasilitas dan kegiatan dapat dibangun mulai dari: (a) *Eco-lodge*; (b) *Eco-recreation*; (c) *Ecoeducation*; (d) *Eco-research*; (e) *Eco-energy*; (f) *Eco-development*; dan (g) *Eco-promotion* (Priyanto dan Dyah. S, 2015). Maka dalam pembangunan desa wisata dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat, yakni dengan mengimplementasikan *Community Based Tourism* (CBT).

Menurut Suansri (2003:14) CBT adalah pariwisata yang menitikberatkan keberlanjutan lingkungan, sosial budaya kedalam satu kemasan. Dengan demikian desa wisata sebagai tempat untuk

berekreasi yang mempunyai ciri khas tertentu dan dapat ditampilkan kepada para wisatawan.

4. Pendapatan Asli Daerah

Di tingkat daerah prespektif pengelolaan keuangan merupakan salah satu bentuk kinerja pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkeadilan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tercantum Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga pengelolaan keuangan daerah, meliputi: (a) Hak daerah memungut pajak-retribusi daerah; dan (b) Penerimaan dan pengeluaran daerah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif. Sehingga penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Sugianto. E, 2015:8). Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan cara identifikasi karakteristik. Menurut Hawadi (2002:107) menyatakan identifikasi adalah suatu prosedur yang dipilih dan yang cocok dengan ciri-ciri yang akan dicari dan selaras dengan program yang akan dikembangkan. Sedangkan karakteristik merupakan ciri atau karakteristik yang

secara alamiah melekat pada diri seseorang yang meliputi umur, jenis kelamin, ras atau suku, pengetahuan, agama atau kepercayaan dan sebagainya. Namun dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian, yakni desa dengan karakteristik, sebagai berikut: (1) Besarnya peranan kelompok primer; (2) Faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok atau asosiasi; (3) Homogen; (4) Hubungan lebih bersifat intim dan awet; (5) Mobilitas sosial rendah; (6) Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi; dan (7) populasi anak dalam proporsi yang lebih besar (Roucek dan Warren, dalam Indrizal 2013). Adapun tahapan penelitian meliputi pengurusan izin dan observasi pendahuluan (awal), persiapan sarana dan prasarana penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data, analisis data, serta pembuatan laporan dan seminar hasil.

Adapun pendapat lain, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2007:62-63). Adapun jenis wawancara yang digunakan merupakan wawancara terbuka 'yang diwawancara' mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu (Moeleong, 1998:137). Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat data yang telah diperoleh. Untuk lokasi penelitian yang akan dilakukan, yang berada di Kabupaten Ciamis provinsi Jawa Barat. Indikator pencapaian dalam penelitian ini, yakni adanya pengelompokan desa wisata di Kabupaten Ciamis yang dapat dijadikan

sebagai sumber retribusi baru untuk peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

D. HASIL PENELITIAN

1. Potensi Desa Wisata di Kabupaten Ciamis

Kabupaten Ciamis dengan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah dan keindahan panorama alam memberikan kesan tersendiri bagi para wisatawan yang datang ke wilayah tersebut. Masyarakat Tatar Galuh Ciamis di beberapa wilayah masih ada yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga masih ada di wilayah perdesaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat budaya daerah yang kental dengan nuansa Sunda, baik itu dari segi bahasa, pakaian, bahkan bentuk rumah. Inilah yang menjadi dasar atau modal sosial, bahwasannya Kabupaten Ciamis mempunyai potensi di bidang pariwisata. Adapun beberapa desa yang mempunyai potensi dan dapat dijadikan sebagai desa wisata di Kabupaten Ciamis, sebagai berikut:

a. Desa Sukahurip

Desa Sukahurip merupakan sebuah desa yang mempunyai potensi sumber daya alam dan budaya yang kompleks. Desa Sukahurip terletak di wilayah Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dengan luas wilayah 350 Ha. Kebudayaan masyarakat Desa Sukahurip yang ada, diantaranya Tradisi Ngaruat Lembur, Tradisi Ziarah, Tradisi Hajat Tujuh Bulan, Tradisi Hajat Empat Bulan, Tradisi Numbal Bumi. Di Desa Sukahurip juga terdapat cagar budaya, salah satunya Makam Embah Buyut Mahad. Untuk potensi wisata alam di Desa Sukahurip terdapat curug yang bernama Curug Salosin. Salosin dalam Bahasa Sunda

diartikan berjumlah 12 (dua belas). Di beberapa lokasi curug tersebut terdapat beberapa larangan yang bertujuan untuk kelestarian curug.

Curug Salosin berada di Dusun Palasari Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dan hal tersebut menjadi dasar Desa Sukahurip dapat dijadikan sebagai desa wisata, karena mempunyai banyak potensi ekonomi, wisata, dan budaya. Potensi wisata yang ada di desa tersebut dikelola oleh Pokdarwis Desa Sukahurip yang dimotori oleh masyarakat desa.

b. Desa Karangampel

Desa Karangampel merupakan sebuah desa dengan potensi seni dan kebudayaan yang kental dengan adat istiadat masyarakat Sunda. Desa Karangampel terletak di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yang mempunyai tradisi Mupunjung. Selain itu pula terdapat situs bersejarah yang dapat menjadi cagar budaya dan berpotensi sebagai objek wisata budaya. Adapun situs bersejarah yang berada di Desa Karangampel, diantaranya: Mbah Kyai Malangarsa, Mbah Kyai Malangmita, Mbah Kyai Madsari, Mbah Kyai Sumirang, Mbah Sindén, Malang Dewa, Mbah Kyai Ranggajati, Aki Kuwu Jegud, Raksa Santana, Raksa Daria, Raksa Lingga, Buyut Ranti, Kyai Kertibangsa, Kyai Wanan Tapa dan Wanan Tara, Mbah Jogo Boyo, Kyai Prabu Wisnu, Kertamangala, serta Buyut Natayuda.

Dengan potensi wisata budaya dan adanya tradisi yang masih tetap dipelihara, maka Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dapat menjadi desa wisata. Keberadaan lokasi yang cukup strategis dengan adanya konektivitas jalan raya, maka akses menuju ke lokasi dapat

dengan mudah ditempuh dengan kendaraan. Pengelolaan situs budaya tersebut dikelola dan dilestarikan oleh Komunitas Penggiat Potensi Sejarah dan Nilai Budaya Kabuyutan Galuh Bojongloa.

c. Desa Karangpaningal
Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis merupakan salah satu desa yang sebagian kelompok masyarakatnya termasuk ke dalam masyarakat adat. Terdapat sebuah perkampungan yang dinamai Kampung Adat Kuta yang mempunyai keunikan dari segi tradisi dan bentuk rumah yang masih bertahan dengan desain rumah tempo dulu. Di desa tersebut terdapat hutan keramat dan kesenian, seperti: Gondang Buhun. Wilayah kampung adat dikelola oleh Komunitas Budaya Kampung Adat Kuta dengan anggota berasal dari masyarakat asli Kampung Kuta.

d. Desa Medanglayang

Desa Medanglayang merupakan salah satu desa yang terletak di daerah Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Terdapat salah satu potensi desa yang mulai dikembangkan oleh masyarakat yang bergerak di bidang wisata alam. Salah satu objek wisata yang ada di desa tersebut, yaitu Bumi Perkemahan Jamiaki dan pengelolaannya oleh masyarakat sekitar desa. Geliat ekonomi terlihat setelah dibukanya bumi perkemahan tersebut dan pengunjung mulai banyak yang datang untuk menikmati panorama alam Puncak Jamiaki. Ekonomi kemasyarakatan memang diusung dalam konsep pengembangan objek wisata tersebut.

e. Desa Bangunharja

Desa Bangunharja sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Cisaga mempunyai potensi wisata alam. Salah

satunya, yakni Curug Cicapar yang berada dikawasan hutan. Pengelolaan curug tersebut dikelola oleh Pokdarwis Desa Bangunharja. Di desa tersebut terdapat pula kerajinan tradisional yang bernama Kamuti. Dengan potensi tersebut, maka geliat wisata desa dapat diimplementasikan dan menjadi salah satu solusi dalam pemberdayaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

f. Desa Sukamaju

Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis merupakan sebuah desa yang mempunyai potensi dalam bidang perkebunan kopi. Kopi yang dibudidayakan oleh para petani setempat berjenis setempat. Mempunyai cita rasa yang berbeda dengan kopi yang lain, kopi yang berasal dari Desa Sukamaju dapat dijadikan sebagai produk unggulan desa dan menjadi daya tarik untuk wisata.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Desa Wisata di Kabupaten Ciamis

Ada beberapa faktor penghambat untuk pendirian dan pengembangan desa wisata di Kabupaten Ciamis, diantaranya:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya sumber daya manusia yang mengerti akan pentingnya kesadaran pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa mengakibatkan terhambatnya pengembangan sebuah konsep desa wisata. Diperlukan orientasi atau pengenalan dan pelatihan pariwisata kepada sumber daya, khususnya SDM agar tercipta sumber daya yang berkompeten dan mendukung peningkatan kualitas pariwisata.

b. Infrastruktur

Sebagian besar dukungan terhadap perbaikan infrastruktur masih kurang. Salah satunya akses jalan yang keadaannya masih tergolong rusak ringan sampai rusak

berat. Inilah yang harus jadi perhatian pemerintah daerah untuk perbaikan dan penambahan infrastruktur dari sarana listrik, koneksi internet hingga sarana air bersih.

c. Anggaran

Anggaran masih menjadi permasalahan utama bagi masyarakat desa untuk mengembangkan objek wisata dan menjadikan desanya maju untuk menjadi desa wisata. Selain itu, masyarakat masih menunggu bantuan dana stimulus untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan desa lebih lanjut.

Selain faktor penghambat untuk pembentukan dan pengembangan desa wisata terdapat faktor pendukung, yakni potensi desa dari segi sumber daya alam yang berlimpah dan keragaman budaya yang dapat dijadikan sebagai atraksi wisata. Selain itu terdapat modal sosial yang dapat menjadi pendukung dari pembentukan dan pengembangan desa wisata, yaitu adanya kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk berdaya melalui kegiatan pariwisata. Sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam upaya pengembangan desa dan peningkatan sumber daya pendukung terciptanya desa wisata yang berkelanjutan.

3. Strategi Pembentukan Desa Wisata di Kabupaten Ciamis

Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan untuk pembentukan dan pengembangan desa wisata sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Ciamis, yakni dengan pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh kelompok masyarakat desa. Adapula yang menyebutnya dengan konsep *Community Based Tourism* (CBT). Konsep wisata tersebut mengarah kepada pemberdayaan masyarakat yang dilibatkan di dalam

pengelolaan objek wisata tertentu. Sehingga konsep tersebut tidak hanya menguntungkan pihak pengembang, baik itu Pemerintah Daerah tetapi juga masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata tersebut.

Noor, M. (2011), menyatakan Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigm baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered* dan *participatory*. Dengan demikian konsep CBT pada hakikatnya bertumpu pada partisipasi masyarakat untuk ikut dalam pembentukan dan pengembangan desa wisata. Pemberdayaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat desa.

Partisipasi dari masyarakat desa sangat dibutuhkan guna pengembangan desa yang lebih maju dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dewi, M. H. U. (2013), menyatakan pengembangan desa wisata membutuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam keseluruhan tahap pengembangan mulai tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut beberapa kelompok masyarakat di Kabupaten Ciamis cukup antusias untuk membuka dan mengembangkan objek wisata baru. Karena hanya sedikit objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Ciamis. Sehingga diperlukan objek wisata baru yang representatif untuk peningkatan retribusi bidang pariwisata. Walaupun demikian tetap yang menjadi prioritas utama, yakni kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat desa membutuhkan akses untuk maju dan berkembang, selain perhatian dari Pemerintah Daerah upaya

pemberdayaan juga seharusnya ada dari masyarakat desa itu sendiri.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (enam) desa yang mempunyai potensi untuk dijadikan desa wisata di Kabupaten Ciamis, yaitu: Desa Sukahurip, Desa Karangampel, Desa Karangpaningal, Desa Medanglayang, Desa Bangunharja, dan Desa Sukamaju.
2. Faktor penghambat dalam terbentuknya desa wisata di Kabupaten Ciamis, yaitu dikarenakan oleh kurangnya sumber daya manusia di perdesaan yang berkompeten dalam pengembangan desa wisata, masih kurangnya sarana prasarana penunjang dan infrastruktur yang relatif masih kurang, serta kurangnya anggaran untuk pengembangan objek wisata masih menjadi permasalahan utama.
3. Faktor pendukung agar terwujudnya desa wisata di Kabupaten Ciamis, yakni banyaknya potensi ekonomi yang berasal dari kekayaan sumber daya alam di perdesaan dan adanya modal sosial sebagai salah satu bagian untuk mempercepat terbentuknya desa wisata. Selain itu, adanya nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber kebudayaan yang masih tetap lestari sampai saat ini.
4. Strategi yang dapat diimplementasikan sebagai upaya pembentukan desa wisata, yakni melalui pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat berperan aktif untuk

mewujudkan desa wisata dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

2. Saran

Untuk pengembangan desa wisata, dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan sebuah konsep desa wisata harus dilakukan oleh Pemerintah Desa yang melibatkan masyarakat desa melalui jalan musyawarah desa. Hal tersebut dimungkinkan untuk terjalannya sinergitas antara Pemerintah Desa dengan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama agar terealisasinya desa wisata yang berkelanjutan dan tentunya pembangunan desa dapat dilaksanakan.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan desa wisata, walaupun dilaksanakan oleh kelompok masyarakat tetap harus ada pengawasan oleh Pemerintah Desa. Hal tersebut agar terkontrol dengan baik dan program pemberdayaan dapat terealisasi dengan lancar. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kepariwisataan.

c. Evaluasi

Evaluasi merupakan sebuah tahap akhir dalam proses perbaikan program. Dalam pengembangan desa wisata diperlukan evaluasi yang mengarah bukan hanya ke masalah teknis, namun harus dapat dimengerti oleh pengelola wisata khususnya kelompok masyarakat yang mengelola sebuah objek wisata. Evaluasi dapat dilakukan melalui sebuah forum pertemuan atau musyawarah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Bungaran. A.S. 2010. Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Dewi, M. H. U. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2).

Dilahun. 1994. Geografi Desa dan Pengertian Desa. *Forum Geografi*.14.(15).119-128.

Dispar. Kab. Ciamis. 2018. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 20132017. Ciamis: Dispar.

Fitari. Y dan Ma'rif. S. 2017. Manfaat Pengembangan Desa Wisata Wonolopo terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Masyarakat Lokal. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*.5.(1).29-44.

Gunn, Clare A. 2002. *Tourism Planning*. New York City : Taylor and Francis.

Hariato, Asis. Dkk. 2011. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Banggai. (Online). Tersedia: pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/07f508de53592473de5e935ee080bf4a.pdf. [01 Agustus 2018].

Hawadi. 2002. Identifikasi Keberbakatan Intelektual Melalui Metode Non Tes. Jakarta: PT Gramedia.

- Indrizal. 2013. Memahami Konsep Pedesaan dan Tipologi Desa di Indonesia. (Online). Tersedia: <http://fisip.unand.ac.id/media/rpkps/EdiIndrizal/M3.pdf>. [10 Agustus 2018].
- Moleong. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Remaja Rosdakarya.
- Noor, M. 2011. Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS*, 1(2/Juli).
- Nuryanti, W. 1993. Concept, Perspective, and Challenges. Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Priyanto dan Dyah.S. 2015. Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Budaya Tinjauan Terhadap Desa Wisata di Jawa Tengah. *Jurnal Vokasi Indonesia*.4.(1).76-84.
- Shohibuddin. M. 2016. Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*.21.(1).1-33.
- Siswadi, S., Taruna, T., & Purnaweni, H. 2011. Kearifan Lokal dalam Melestarikan Mata Air (Studi Kasus di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9(2), 63-68.
- Soemarwoto. O. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.
- Sugiarto. E. 2015. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Widiyanto, D., Handoyo, J. P., & Fajarwati, A. 2008. Pengembangan Pariwisata Perdesaan (Suatu Usulan Strategi Bagi Desa Wisata Ketingan). *Bumi Lestari Journal of Environment*, 8(2).